

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak dulu hingga kini, persoalan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah berat bagi pemerintahan Indonesia. Meskipun data dari Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan tren penurunan baik didalam jumlah maupun persentase warga miskin, nilai garis kemiskinan justru terus mengalami kenaikan. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah meluncurkan beragam kebijakan dan paket bantuan sebagai langkah konkret. Salah satu terobosan strategis yang mulai dijalankan di tahun 2007 untuk mempercepat pengurangan angka kemiskinan adalah pemberian bantuan sosial bersyarat yang lebih populer dengan sebutan Program Keluarga Harapan (PKH).

PKH merupakan program kolaboratif lintas sektor yang menggabungkan layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial, di mana bantuan finansial dengan syarat tertentu disalurkan kepada rumah tangga yang masuk didalam kategori paling miskin. Penerima manfaat adalah individu-individu yang memenuhi standar kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) serta memiliki tanggungan seperti ibu hamil atau anak balita. Tujuan utama dari inisiatif ini adalah menekan laju kemiskinan sekaligus memutus siklus kemiskinan antargenerasi, memperbaiki mutu modal manusia, serta mendorong perubahan kebiasaan di kelompok sasaran yang selama ini dinilai kurang mendukung upaya peningkatan taraf hidup mereka. [1].

PKH merupakan salah satu bentuk kebijakan perlindungan sosial yang digagas pemerintah sebagai respons kepada dua persoalan mendasar, yakni mutu sumber daya manusia yang masih tergolong rendah dan tingginya angka penduduk miskin yang memerlukan intervensi dengan sejumlah ketentuan khusus. Didalam konteks penyaluran bantuan ini di berbagai wilayah, penelitian ini menjadikan Desa Sepang Kelod, yang terletak di Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, sebagai lokus kajian. Berdasarkan keterangan dari Kepala Dusun setempat, masih banyak warganya yang tidak menyadari bahwa desa tersebut memiliki beragam indikator prioritas didalam menentukan siapa yang berhak menerima PKH, seperti kepala keluarga dari golongan ekonomi lemah, ibu hamil, anak balita, manula, difabel, pelajar jenjang SD, SMP, hingga SMA, serta dengan catatan tidak sedang menerima bantuan serupa seperti BLT UMKM, subsidi upah, atau kartu pra-kerja, dan yang namanya tercantum didalam basis data DTKS.

Pendekatan yang dipakai didalam penelitian ini adalah Analytic Network Process (ANP). ANP merupakan teknik pengambilan keputusan yang bisa menangkap bobot prioritas dari berbagai pemangku kepentingan dengan memperhatikan relasi timbal balik yang saling memengaruhi, baik di antara sesama kriteria maupun subkriteria. Pendekatan ini merupakan perluasan dari metode Analytic Hierarchy Process (AHP), sehingga tingkat kerumitannya relatif lebih tinggi dibandingkan AHP. Berbeda dengan model hierarkis, ANP mengandalkan struktur jaringan yang memungkinkan adanya saling ketergantungan dan umpan balik, baik di didalam satu kelompok elemen (ketergantungan internal) maupun antar kelompok elemen (ketergantungan eksternal). Dengan kebiasaannya menangani permasalahan yang tidak terstruktur serta memperhitungkan hubungan antar

elemen, metode ini bisa menghasilkan rekomendasi keputusan yang sangat presisi dan bisa diandalkan.

System Usability Scale (SUS) adalah instrumen kuesioner yang dirancang untuk menilai aspek kemudahan pemakaian suatu sistem komputer berdasarkan persepsi subjektif pemakainya. Alat ukur ini pertama kali diperkenalkan oleh John Brooke di tahun 1986 saat ia bekerja di Digital Equipment Corporation (DEC), dengan tujuan awal untuk mengevaluasi produk perkantoran terpadu DEC ALL-IN-1 yang mencakup fitur surel, pengolah kata, serta penjadwal, yang dioperasikan melalui layar terminal VT-100 (Brooke, 2011 sebagaimana dikutip oleh Sauro, 2011). Dikembangkan sebagai skala yang praktis dan cepat, SUS hadir untuk menjawab kebutuhan akan instrumen pendek namun tetap andal [2]. Didalam ranah pengukuran kegunaan, terdapat tiga dimensi utama yang menjadi perhatian, yaitu efektivitas, efisiensi, dan kepuasan, sehingga setiap evaluasi kepada kegunaan produk idealnya mencakup ketiga aspek tersebut. SUS menjadi salah satu pendekatan yang bisa dimanfaatkan untuk menguji aspek kegunaan, dan metode ini bersifat fleksibel karena bisa diterapkan di berbagai jenis teknologi, baik perangkat keras, perangkat lunak, situs web, maupun gawai bergerak (Sauro, 2011 didalam [5]).[3]

Dengan informasi dari Kepala Desa bahwa proses pemilihan penerimaan bantuan seringkali tidak mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemilihan penerimaan bantuan dilaksanakan secara wawancara masing masing Masyarakat. Cara penentuan penerima bantuan sosial yang ada saat ini, yaitu melalui rapat desa, berisiko menyebabkan ketidakadilan dan penyimpangan. Keputusan yang diambil seringkali tidak berdasarkan data yang *valid*, sehingga bantuan tidak selalu diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, didalam penelitian

ini dikembangkan sebuah sistem penunjang keputusan untuk seleksi penerima PKH dengan mengadopsi metode Analytic Network Process (ANP). Metode ini dipilih lantaran kebisaannya didalam mengakomodasi relasi timbal balik antarkriteria dan subkriteria secara komprehensif, sehingga proses penentuan calon penerima manfaat menjadi lebih terukur dan tidak bersifat spekulatif. Jika dibandingkan dengan pendekatan konvensional yang sarat akan unsur subjektivitas, ANP menawarkan mekanisme yang memperhitungkan saling ketergantungan serta arus balik di antara berbagai elemen, sehingga rekomendasi yang keluar memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dan terjamin keadilannya.

Selain menghasilkan keputusan, penting pula untuk mengetahui bagaimana sistem dipakai dan bagaimana keputusan tersebut diterima oleh responden. Oleh karena itu, penelitian ini melaksanakan dua bentuk pengujian. Pertama, pengujian SPK dengan metode ANP untuk menilai keakuratan hasil keputusan didalam menentukan penerima PKH. Tahapan selanjutnya didalam penelitian ini adalah melaksanakan evaluasi kepada pengalaman pemakai dengan memakai dua instrumen, yakni System Usability Scale (SUS) dan User Experience Questionnaire (UEQ). SUS berfungsi untuk menilai berbagai aspek fungsionalitas sistem secara menyeluruh, mencakup kemudahan pengoperasian, logika navigasi, dan keseragaman antarfitur. Di sisi lain, UEQ dipakai untuk menggali persepsi pemakai secara lebih komprehensif, yang meliputi variabel-variabel seperti tingkat atraktivitas, kecepatan akses, kemudahan pemahaman, akurasi, daya rangsang, serta unsur inovasi dari sistem yang dikembangkan. Dengan kombinasi kedua instrumen ini, penelitian bisa memberikan gambaran yang komprehensif, tidak hanya terkait akurasi

keputusan, tetapi juga kepuasan dan penerimaan pemakai kepada sistem yang dikembangkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pokok persoalan yang menjadi fokus kajian didalam penelitian ini bisa dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana rancangan bangun Sistem Pendukung Keputusan PKH berbasis ANP di Desa Sepang Kelod?
2. Bagaimana implementasi rancangan bangun Sistem Pendukung Keputusan PKH berbasis ANP di Desa Sepang Kelod?
3. Bagaimana tingkat pengalaman pemakai dan tingkat kegunaan Sistem Pendukung Keputusan PKH berbasis ANP berdasarkan pengujian UEQ dan SUS?

1.3 Tujuan Penelitian

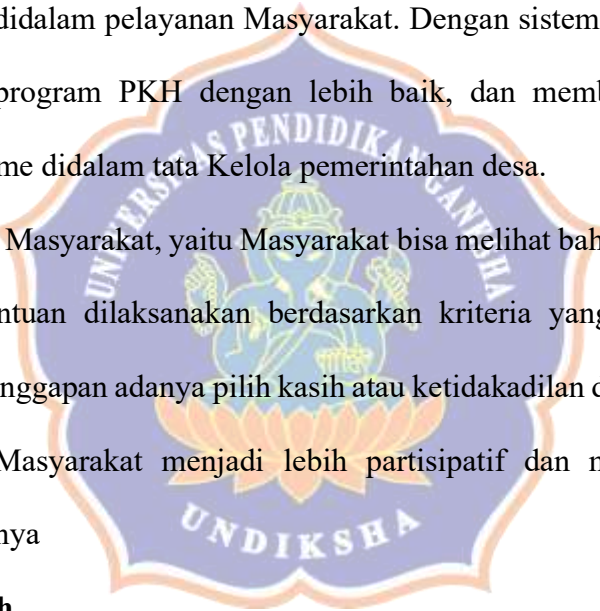
Adapun sasaran yang hendak dicapai didalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membuat rancangan Sistem Pendukung Keputusan PKH berbasis ANP (Studi Kasus: Desa Sepang Kelod).
2. Mengimplementasikan sistem pendukung keputusan PKH berbasis ANP (Studi Kasus: Desa Sepang Kelod).
3. Untuk mengetahui pengalaman pemakai dan kegunaan dari Sistem Pendukung Keputusan PKH berbasis ANP (Studi Kasus: Desa Sepang Kelod)

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa kontribusi positif yang menjadi target perolehan dari studi ini adalah sebagai berikut:

1. Menjadi alat bantu bagi aparat desa didalam memutuskan siapa saja penerima PKH di Desa Sepang Kelod berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan.
2. Menyederhanakan proses seleksi calon penerima bantuan PKH di Desa Sepang Kelod agar keputusan bisa diambil dengan lebih cepat dan terarah.
3. Manfaat untuk aparat Desa, yaitu bisa meningkatkan keadilan,efisiensi,dan transparansi didalam pelayanan Masyarakat. Dengan sistem ini desa tidak hanya menjalankan program PKH dengan lebih baik, dan membangun kepercayaan profesionalisme didalam tata Kelola pemerintahan desa.
4. Manfaat bagi Masyarakat, yaitu Masyarakat bisa melihat bahwa proses penentuan penerima bantuan dilaksanakan berdasarkan kriteria yang jelas dan terukur. Mengurangi anggapan adanya pilih kasih atau ketidakadilan dari pihak aparat desa dengan ini Masyarakat menjadi lebih partisipatif dan mendukung program program lainnya



1.5 Batasan Masalah

Lingkup pembahasan didalam penelitian ini dibatasi di hal-hal sebagai berikut:

1. Lokus yang menjadi sasaran kajian didalam penelitian ini adalah Desa Sepang Kelod.
2. Pendekatan Analytical Network Process (ANP) diterapkan sebagai alat bantu untuk mengoptimalkan proses penetapan penerima bantuan PKH.

3. Pengambilan data dilaksanakan dengan cara wawancara di Kantor Desa Sepang Kelod.
4. Hasil rekomendasi pemberian bantuan PKH hanya untuk masyarakat Desa Sepang Kelod.

